

SKRIPSI

GOVERNANCE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KALURAHAN
MUNTUK KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun oleh :

IGNASIUS SUHARTO

17520211

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL
GOVERNANCE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KALURAHAN
MUNTUK KAPANEWON DLINGO, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta



Disusun Oleh :
IGNASIUS SUHARTO
17520211

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.


Hari : Senin

Tanggal : 17 Juli 2023

Waktu : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Dosen Pembimbing	
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Dosen Penguji I	
<u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> Dosen penguji II	



Ketua Ilmu Pemerintahan

(Dr. Rijel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignasius Suharto

Nomor Induk Mahasiswa : 17520211

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Governance Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta** benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari nanti tulisan diatas di tulis sebagai mana harusnya terdapat pelanggaran atau terdapat tulisan orang lain maka saya bersedia terima sanksi yang di berikan.

Yogyakarta 07 Agustus 2023



atakan :

Ignasius Suharto

17520211

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan karena berkat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang masih memperkenankan saya untuk menulis sehingga menghasilkan sebuah karya sebagai bentuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Naskah skripsi ini disusun sebagai pemenuhan dalam memperoleh gelar sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Terima kasih dihaturkan untuk setiap lingkungan, orang, suasana dan beragam dimensi lainnya yang telah ikut ambil bagian dalam penyelesaian tulisan ini. Tulisan ini dipersembahkan kepada :

1. Orang tua yang tersayang, Bapak Antonius Kedit dan Ibu Fransiskan Romana Maria yang selalu mendoakan dan kasih semangat serta motivasi kepada saya. Terima kasih Bapak dan Mama yang selalu kasih dukungan kasih sayang.
2. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si, selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikiran serta sabar dalam memberikan bimbingan kepada saya selaku penulis skripsi ini. Terima Kasih Ibu.
3. Keluarga saya, Bang Ipang, Kak Eka, Bang Tommy, Kak Elen Arni, Faris dan Cia yang selalu menyemangati selama saya menempuh pendidikan di Yogyakarta.
4. Organisasi Internal Kampus UKM Musik Ganesha STPMD”APMD” Yogyakarta dimana tempat ini saya pernah sebagai saya bertumbuh dan berkembang.

Atas semua bentuk dukungan yang berlimpah, penulis mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya dalam hidup kita semua. Amin.

MOTTO

1. Jangan takut jatuh dan terantuk dengan terbentur maka Anda akan terbentuk
2. *Life must go on*
3. Tahu diri, tahu tempat, dan tahu waktu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Allah Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan Skripsi Berjudul Pembangunan Infrastruktur Di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata -1 Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD’ Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen saya yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini:

1. Kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Kepala Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD“ Yogyakarta. Yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan studi di STPMD.
2. Kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Rektor. Sekaligus, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan S-1. Yang mempermudah penulis dalam urusan administrasi dalam penulisan Skripsi ini.
3. Kepada Dosen saya Kepada Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Rektor sekaligus Dosen pembimbing saya yang penuh kesabaran, baik hati, dan sangat teliti, serta mau memberikan pemahaman sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya ini. Saya selaku penulis

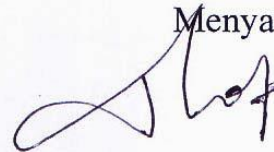
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dalam proses penyusunan Skripsi saya.

4. Kepada kedua Orang Tua saya terutama Bapak Antonius Kedit, dan Ibu saya Fransiska Romana Maria terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan doa dan dukungan selama proses dalam mengerjakan skripsi saya. Terima Kasih kepada Abang Kandung saya, Fransiskus Ningkan yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses mengerjakan Skripsi saya. Terima Kasih kepada pasangan saya Welni Anugrah Lestari yang selalu setia menemani saya serta selalu berjuang dan memberikan dukungan ke saya dalam pengerjaan skripsi sampai dari hari ke hari sampai saat ini, terimakasih sebanyak- banyaknya saya ucapkan.
5. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.

6. Kepada Kepala Lurah Muntuk Bapak Marsudi Dan seluruh Perangkat/Pamong Kalurahan Muntuk yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam proses pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini.

Yogyakarta 07 Agustus 2023

Menyatakan :



Ignasius Suharto

17520211

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Literatur Review	9
G. Kerangka Konsep	16
H. Metode Penelitian	22
BAB II PROFIL KALURAHAN MUNTUK	30
A. Geografis Kalurahan Muntuk	30
B. Kondisi Topografi	31
C. Keadaan Demografi	33
D. Tingkat Pendidikan	35
E. Kondisi Ekonomi Masyarakat	36
D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Muntuk	42
E. Padukuhan Kalurahan Muntuk	56

F. Lembaga Kemasyarakatan	56
BAB III ANALISIS GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KALURAHAN MUNTUK.....	57
A. Relasi Antara Pemerintah Kalurahan, Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur	57
B. Interaksi Antara Pemerintah Kalurahan, Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur	66
C. Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Infrastruktur	73
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
Lampiran-Lampiran.....	82
.....	83
.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan.....	23
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	34
Tabel 2. 3 Jenis Pendidikan	35
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	37
Tabel 2. 5 Prasarana Kesehatan	38
Tabel 2. 6 Prasarana Pendidikan.....	39
Tabel 2. 7 Prasarana Umum	39
Tabel 2. 8 Prasarana Ibadah.....	40
Tabel 2. 9 Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Muntuk	53
Tabel 2. 10 Kepegawaian Kalurahan Muntuk	55
Tabel 2. 11 Padukuhan Kalurahan Muntuk	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Muntuk 32

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintah Kalurahan Muntuk	42
Bagan 2. 2 Struktur BAMUSKal	50

INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan suatu makna bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa termasuk di dalamnya pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKal). Dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Pemerintah Kalurahan Muntuk melakukan musyawarah dusun, musyawarah kalurahan, dan musyawarah perencanaan pembangunan. Masalah yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di Kalurahan Muntuk adalah masalah pembiayaan sehingga pembangunan infrastruktur menjadi molor dan terkendala berupa jalan menuju irigasi pertanian dan jalan antar rumah warga. Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan tetapi dipengaruhi oleh Masyarakat setempat dan pihak swasta yang diberi kewenangan mengelola serta menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul DIY.

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga diharapkan menghasilkan uraian yang tajam dan mendalam mengenai individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu di kaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan proses pengumpulan data, identifikasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sudah cukup optimal. Relasi Pemerintah Kalurahan Muntuk dalam pembangunan Infrastruktur sudah cukup optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Kalurahan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat di Kalurahan. Interaksi Pemerintah Kalurahan Muntuk Dalam Pembangunan Infrastruktur sudah berjalan sangat baik hal itu bisa di lihat dalam proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui Musyawarah Dusun, Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah rencana pembangunan. Pemerintah Kalurahan Muntuk melakukan musyawarah terlebih dahulu melibatkan perwakilan Masyarakat, Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKal), Ketua RT, Ketua PKK, dan Dukuh. Adapaun faktor penghambat dalam pembangunan di Kalurahan Muntuk adalah Masalah pembiayaan yang dimana luas wilayah perbukitan dan terjal sehingga pembangunan infrastruktur menjadi molor dan terkendala maka dari itu Pemerintah Kalurahan Muntuk memetakakan pembangunan infrastruktur apa yang dibutuhkan masyarakat Kalurahan Muntuk.

Kata Kunci : *Governance, Pembangunan Infrastruktur*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Governance merupakan relasi atau interaksi pemerintah dengan masyarakat hukum, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil dan masyarakat lokal yang ada didalamnya. *Governance* diartikan sebagai sebuah pelaksanaan otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana pada sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pula pada pembangunan dan ekonomi sosial masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Maka dari itu tata pemerintah yang baik perlu segera dilakukan dalam suatu desa agar segala permasalahan yang timbul bisa di atasi, dipecahkan, dan dapat segera ditemukan solusinya untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik perlunya dukungan dari segala pihak, adapun pihak yang mendukung agar tata pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan lancar seperti aparatur negara, pihak swasta, dan masyarakat setempat. dengan terwujudnya *governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Maka dari itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara transparan, akuntabel, efisien, efektif dan menjunjung tinggi asas demokrasi desa.

Pembangunan adalah substitusi untuk mewujudkan amanat dan cita-cita bangsa dalam rangka untuk melakukan perubahan demi terwujudnya pembangunan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin. Pembangunan seperti pembangunan sumber daya infrastruktur, pembangunan sumber daya alam (SDA), pembangunan sumber daya sosial budaya, dan Pembangunan sumber daya manusia (SDM). Maka dari itu Pemerintah selaku aparat yang bertugas melayani kepentingan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan program pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah. perlu di pahami bahwa untuk merancang pembangunan masyarakat desa di Indonesia tidak hanya menjadi tugas Pemerintah, Melainkan diperlukan adanya relasi, dukungan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang kemudian disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang punya kewenangan

untuk mengatur, serta mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia. Tentu ini sangat menggembirakan apabila Desa dengan adanya undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014 yang pada akhirnya desa diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah otonomi desa akan memberikan manfaat seperti yang diharapkan masyarakat desa untuk tercapainya kesejahteraan bersama?. Yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, produktif dan sejahtera sesuai dengan amanat cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan tentang desa, desa diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan di desa, yang dimana Pemerintah desa dituntut membuat visi dan misi serta program kerja mengedepankan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu pemimpin daerah diharapkan merancang sebuah program kerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat miskin; sebaliknya pola kepemimpinan yang regresif dan konservatif akan membawa desa pada ketertinggalan pembangunan desa yang kemudian menyebabkan desa menjadi miskin melarat. Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi

lokal yang kreatif inovatif, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa yang adil dan makmur.

Menurut Soetoro Eko Yunanto (Sutoro Eko, 2019) kemakmuran dan kesejahteraan hanya bisa dicapai dalam masyarakat yang demokratis.

Desa merupakan sebuah organisasi kekuasaan tingkat lokal yang ada di Indonesia, yang secara mempunyai mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari Pemerintahan Negara (Rudiadi & Herawati, 2017).

Kalurahan Muntuk ialah salah satu kalurahan yang termasuk ke dalam wilayah Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Muntuk terletak pada 10 Km ke arah timur dari pusat Kapanewon Dlingo dan jaraknya berkisar 18 Km dari ibu kota Kabupaten Bantul, serta jarak tempuh 25 Km dari ibu kota Diy. Kalurahaan Muntuk memiliki beberapa lembaga yang ada di dalamnya antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan (LPMD), tim penggerak PKK Kalurahan (TP PKK Kal) dan Karang Taruna. Serta pada tingkat pedukuhan terdapat Pokgiat LPMD, kelompok PKK pedukuhan, Karang Taruna Padukuhan dan rukun tetangga (RT), posyandu dan rukun tetangga.

Dalam pembangunan infrastruktur di Kalurahan seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi akan kurang bermakna karena tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering muncul apabila pemerintah tidak memperhatikan hal tersebut maka akan menjadi

masalah yang serius karena akan menambah angka kemiskinan pada tingkat kalurahan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan saudara kembar yang saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap: 1) Rendahnya partisipasi masyarakat; 2) Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat; 3) Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan; 4) Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya pekat; dan 5) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kalurahan.

Insfrastruktur dibagi 2 yaitu insfrastruktur fisik berupa jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain sedangkan insfrastruktur non fisik berupa sumber daya manusia Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan dari hasil pra-observasi penulis menemukan beberapa masalah yang *pertama* belum ada pembebasan/perizinan lahan oleh masyarakat Kalurahan Muntuk dalam pembangunan insfrastruktur sehingga pembangunan insfrastruktur menjadi molor dari rencana yang seharusnya akibat harus menunggu pembebasan lahan selesai terlebih dahulu contohnya akses jalan antar rumah warga, jembatan, dan irigasi, *kedua* di pengaruhi oleh kondisi geografis wilayah/luas wilayah Kelurahan Muntuk sebagian besar perbukitan dan terjal sehingga menjadi kendala dalam proses pemerataan pembangunan insfastruktur, dan ketiga keterbatasan anggaran dana dari Pemerintah Kalurahan dengan stakeholder sehingga, pembangunan insfrastrur di lakukan dengan cara bertahap-tahap.

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan di Kalurahan Muntuk. Maka *Governance* merupakan Kondisi aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan

pemerintahan merupakan proses kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat kalurahan, ekonomi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak privat atau swasta. *Governance* merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan dalam tercapainya tujuan negara dan tujuan masyarakat maka dari itu perlu adanya partisipasi atau keterlibatan warga negara maupun warga masyarakat terkhusus masyarakat desa dalam menciptakan pembangunan yang sejahtera.

Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui *governance* dalam pembangunan Kalurahan di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul DIY. Mengingat begitu pentingnya *governance* Pemerintah Kalurahan Muntuk dalam proses pemerataan pembangunan infrastruktur. Sehingga penulis sangat relevan untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, Terutama menyambut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tentang desa berdasarkan pasal 1 ayat (9) Permendagri Nomor 144 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini berjudul *Governance* Pemerintah Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul DIY.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang *governance* Pemerintah Kalurahan Dalam Pembangunan

Infrastruktur di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti adalah bagaimana *Governance* dalam Pembangunan Infrastruktur Kalurahan di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul DIY ?

C. Fokus Penelitian

Untuk menentukan dan menegaskan fokus penelitian ini mengenai objek yang akan diteliti agar mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah adapun yang menjadi focus penelitian ini adalah *Governance* Pemerintah Kalurahan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul yang terjadi. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Soetoro Eko Yunanto (<https://www.youtube.com/watch?v=n6nVq-I8-IY>).

1. Relasi antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur
2. Interaksi antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan swasta dalam pembangunan Kalurahan infrastruktur
3. Faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan *Governance* dalam Pembangunan Infrastruktur Kalurahan di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo , Kabupaten Bantul DIY.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan konsep teori-teori baru, ilmu pengetahuan, dan informasi terbaru yang digunakan dalam program studi ilmu pemerintahan untuk mengembangkan ide melalui pemikiran bagi para pembaca
2. Makna praktis dari penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pandangan tentang bagaimana *Governance* Pemerintah Kalurahan dalam Pembangunan serta Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat desa yang akan melaksanakan kedepannya.

F. Literatur Review

Kajian literature tentang *Governance* Pembangunan Infrastruktur telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti :

Pertama (Fitrianti et al., 2022) *Jurnal Of Regional And Rural Development Planning Dalam Jurnal*, Volume 6, Tahun 2022. yang berjudul pembangunan insfrastruktur di Desa dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review yaitu mengkaji dan membaca kembali pokok-pokok pikiran tentang topik yang sama dan kemudian menambahkan argumen serta pandangan atau pendapat penulis mengenai subjek yang akan diangkat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan bahwa dalam perencanaan pembangunan perdesaan pada saat ini perlu adanya sebuah perencanaan yang efektif, transparan, akuntabel dan punya master plan yang bagus.

Kedua (Sudirman & Susilawaty, 2022) *Jurnal Journal Publicuho Dalam*, Volume 5, Tahun 2022. jurnal yang berjudul “Kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): suatu rewiw literature sistematis”, masalah yang ditemukan ialah pembedaan ketidaksetaraan atas gender di tengah masyarakat. kajian studi ini menggunakan pendekatan Reviuw Literatur Sistematis, serta fungsinya untuk menyelidiki, menganalisis, dan menyajikan literatur akademik mutakhir yang berfokus pada kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. berdasarkan hasil analisis jaringan dari VOS Viewer (software yang dapat digunakan untuk visualisasi data publikasi). pada penelitian ini diketahui sebanyak 3 cluster isu yang

ditemui tentang kesetaraan gender dalam ekonomi, pengaruh serta dampaknya terdapat pada kepemimpinan perempuan dalam organisasi, partisipasi politik perempuan, pemberdayaan perempuan dan reproduksi kesehatan yang berdampak pada kesetaraan dalam kesempatan kerja. Sehingga hal tersebut yang dapat mendorong partisipasi Perempuan dan anak perempuan agar mereka menikmati akses yang sama adalah pada bidang pendidikan, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik, pengambilan keputusan di semua tingkatan sebagai prasyarat untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga (Tokan & Gai, 2020) Jurnal Caraka Prabhu, Volume 4, Tahun 2020. yang berjudul “ Partisipasi politik perempuan Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone Kabupaten Flores Timur”. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah supaya kepentingan fundamentalnya kaum Perempuan dapat segera diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran desa yang peka gender dan gender budgeting serta Secara kuantitatif kesadaran perempuan dalam mendukung pembangunan desa cukup tinggi yang kemudian menciptakan pembangunan desa tanpa kelas.

Keempat (Puspitasari et al., 2022) Jurnal Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta). Volume 03, Tahun 2022. Dalam jurnal ini berjudul Pola Relasi Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana Relasi, Interaksi, Dampak Pemerintah Kelurahan Bleberan dengan BUMDes Sejahtera. Pada penelitian

ini menggunakan perspektif *governance* dan perspektif hybrid institutions. Dari penelitian ini membuktikan relasi antara Pemerintah Desa Bleberan dengan BUM Desa Sejahtera telah tersistem dan terpola dengan baik sebagai perwujudan dari perspektif *governance*.

Kelima (Chandra & Triwidaryanta, 2022) Nama Jurnal *governabilitas* (Studi Ilmu Pemerintahan Semesta), vol (3). Penelitian ini berjudul Promblema tentang Relasi kuasa Lembaga adat Dengan pemerintah Desa “Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa’ Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”. Jadi dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa Lembaga organisasi masyarakat desa, permusyawaratan masyarakat desa, dan sebagai Pemegang Hukum di desa, Ruang tempat penampung aspirasi masyarakat lurang maksimal dalam mengelola demokrasi warga desa. Penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatif kualitatif untuk menjelaskan bekerjanya demokrasi melalui sistem pemerintahan adat dan upaya mewujudkan kesejahteraan.

Keenam (Kurniasih & Wijaya, 2017) Jurnal Of Public Sector Innovations), Vo (1). Penelitian ini berjudul ”Kegagalan bisnis pemerintah desa : Studi Tentang Relasi Bisnis Pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas”. Tujuan dari penulisan jurnal ini menganalisa secara umum tentang kreativitas dan inovasi pemerintah desa dalam mengelola ruang demokrasi yang ada di desa, dan secara khusus mengkaji pola relasi Pemerintah pada pengelolaan BUMDes. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini

di temukan dimana kepala desa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya seperti pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang terlalu mendominasi dan menginterpendensi diluar tugas kepala desa sehingga kekuasaan pemerintah desa mengakibatkan terhambatnya cara kerja Korporasi BUMDes mengelola segenap potensi Desa.

Ketujuh (Gugat et al., 2022) Jurnal Ijd-Demos, Volume 4, Tahun 2022. Penelitian ini berjudul “Relasi Kekuasaan antar Pemerintah, masyarakat dan LSM pada Revitalisasi Teluk Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat relasi dan interaksi kekuasaan antar pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil pembahasannya relasi kekuasaan antara pemerintah jakarta, masyarakat dengan swasta tidak berjalan secara optimal, hal itu ditandai dengan proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah provinsi jakarta yang dimana masyarakat tidak di serap aspirasinya oleh pemerintah kota jakarta sehingga dari kebijakan yang dihasilkan benar-benar merugikan masyarakat itu sendiri. Seorang pemimpin pemerintah hendaknya benar-benar mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya melalui kebijakan yang diputuskan.

Kedelapan (Andriyani, 2023) Jurnal Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 8, Tahun 2023. Penelitian ini berjudul “Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang terbuka Hijau”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan berita dalam mengelola relasi dan interaksi kuasa pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) bersama masyarakat. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memikirkan keterlibatan dan fungsi peran pada setiap informan dalam memperoleh narasumber. Hasil pembahasan diketahui bahwa Pengelolaan ruang terbuka hijau tidak melibatkan aspirasi masyarakat hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Pelaksanaan program ini yang kian menimbulkan masalah tentang terbatasnya ruang terbuka hijau karena pemkot kurang menyerap aspirasi dari masyarakat itu sendiri Pemkot Surabaya tetap konsisten dalam menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007 yang dimana perda tersebut sangat merugikan masyarakat. Maka dari itu Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus melibatkan aspirasi dari masyarakatnya dalam proses pembuatan keputusan yang baik dan benar supaya tidak merugikan rakyat itu sendiri.

Kesembilan (Retei Alfri Sandi, 2022), Jurnal JISPAR, Jurnal Ilmu sosial, Politik Dan Pemerintahan, Volume 11, Tahun 2022. Penelitian ini berjudul “Membangun Relasi Hubungan Pemerintah Swasta Masyarakat Civil Dalam Paradigma *Governance* Untuk Kalteng Lebih Berkah Dan Bermartabat”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Praktik *governance*. hasil pembahasan bahwa Kondisi pandemik corona virus (Covid 19) sampai saat ini masih terus berlangsung melanda Indonesia. Dampak dari corona virus sendiri bisa mematikan mata pencaharian pada masyarakat desa sehingga menyebabkan kemiskinan kian meningkat pada saat corona virus tersebar diindonesia. Maka dari itu corona virus menjadi masalah serius bagi pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana solusi konkritnya. Karena

pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan mampu melindungi warga negaranya dari maraknya penyebaran covid 19. Maka dari itu inovasi dan kreativitas pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan solusi pada setiap permasalahan yang ada di desa tersebut. apalagi didalam menjawab tantangan berat yang terjadi seperti pandemi covid 19 tentang menata kelola pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat covid 19 dengan *menciptakan collaborative governance* kolaborasi yang efisien, efektif, inovatif serta kreatif hal tersebut sangat penting dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat demi tercapainya ketentraman, keamanan dan kesejahteraan bersama.

Kesepuluh (Pratama & Setiawan, 2022) Jurnal Admnistrasi Publik, Volume 8, Tahun 2022. Penelitian ini berjudul "Kapasitas Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan insfrastruktur Desa Makunjung, kapanewon Barito tuhup raya, Kabupaten Murung raya kalteng". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan insfrastrukturu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Dari hasil pembahasan diketahui dimana pemerataan insfrastruktur pembangunan tidak didapatkan secara merata bagi masyarakat desa makunjung itu sendiri hal itu di tandai dengan kurangnya penyerapan aspirasi dari pemerintah desa makunjung dengan masyarakat desa dalam melakukan pembangunan insfrastruktur serta kurang relasi yang baik terhadap pemerintah desa, masyarakat, dan swasta. Peran seorang pemerintah itu sangat penting bagi

masyarakat desa dalam membuat keputusan, kebijakan, moderator, fasilitator dan sebagai pemimpin yang berpihak terhadap masyarakat miskin.

Secara umum, kesepuluh dari penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang relasi pembangunan kalurahan dalam infrastruktur. Persamaannya juga dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Meskipun demikian, penelitian terdahulu tetap mempunyai perbedaan dengan penelitian ini. Jika dicermati, penelitian-penelitian terdahulu belum mengkaji secara spesifik tentang relasi kekuasaan antara pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan satu kewenangan desa yaitu pembangunan desa yang mensejahterakan masyarakat. sedangkan penelitian ini mengungkapkan secara spesifik relasi kekuasaan yang yang terbentuk antara pemerintah kalurahan, masyarakat, dan swasta dalam melaksanakan salah satu kewenangan desa yaitu membangun infrastruktur. Selain itu penelitian ini hendak mengungkap relasi kekuasaan yang terbentuk antara pemerintah kalurahan, masyarakat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

G. Kerangka Konsep

a. Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Terdapat tiga pilar *governance*, yaitu Pemerintah, sektor swasta dan Masyarakat. konsep *Governance* dipahami sebagai tata pemerintahan yang diantaranya adalah interaksi antara pemerintah-negara dengan masyarakat sipil dan ekonomi (Eko, 2020:1).

Menurut Rodhes (Dalam Yuri 2019: 29) istilah dalam konsep *governance*. yaitu pertama, *governance* sebagai *Corporate Governance*; proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil /mengimitasi prinsip-prinsip yang ada pada sektor pribadi, keterbukaan, informasi, integritas, individu, akuntabilitas yang tinggi, dan peran yang lebih jelas. Kedua, *governance* sebagai *the minimal state*: struktur, ukuran, dan peran Pemerintah dirampingkan agar proses penyelenggaraan Pemerintahan lebih efektif dan efisien dengan cara melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi, dan memotong dinas sipil yang dirasa hal tersebut kurang berfungsi.

Governance adalah relasi atau interaksi pemerintah dengan masyarakat hukum, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal. *Governance* juga diartikan proses implementasi kekuasaan dan kekuatan seorang pemimpin politik untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur serta memiliki proses yang kompleks di mana sector masyarakat harus dilibatkan dalam membuat peraturan dan kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur (Tamayao, 2014) .

Governance adalah pemerintah adalah proses interaksi dan proses konstitutif antara pemerintah dengan masyarakat (politik, ekonomi, sipil) agar tidak terjebak pada pemerintahan sebagai perkantoran. konsep *governance* dipahami sebagai tata pemerintahan yang diantaranya ada interaksi antara pemerintah-negara dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (Sutoro Eko, 2020: 1). *Governance* juga bisa dikatakan sebagai situasi kegiatan dalam menjalankan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat miskin. Konsep ini merujuk pada relasi, interaksi, dan dampak antara pemerintah, lembaga politik, dan lembaga sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama terkait pengaturan proses pemerintahan dengan pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun warga masyarakat terkhusus masyarakat desa. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi negoisasi, kolaborasi, konsolidasi, partisipasi, transparansi, resposivitas, rente, free rider, bandit, dll (Sutoro Eko, 2020:). Penelitian ini memusatkan perhatian pada *Governance* Pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mensejahterakan masyarakat desa. relasi antara pemerintah kalurahan dan mitra desa dibutuhkan karena kedua institusi ini memiliki peran yang sangat penting. jika kedua institusi ini membentuk relasi kemitraan dengan kerjasama yang baik maka dalam melaksanakan pembangunan akan berjalan maksimal. kerena pembangunan di ranah kalurahan sangat bergantung pada relasi yang terbentuk antara kedua intitusi tersebut.

Berdasarkan penjelasan model *Governance* diatas, maka penelitian akan melihat tentang bagaimana *Governance* Pemerintah Kalurahan Muntuk menjelaskan Hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kalurahan Muntuk dengan mitra kalurahan menggunakan perspektif *Governance* dan melihat model *Governance* yang sesuai untuk menjelaskan Relasi Pemerintah Kalurahan dan Mitra Desa. Mitra Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa dan BPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berwenang dan hak untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan rekognisi dan subsidiaritas, Pasal 93 berbunyi: “kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang adil dan maju dalam pembangunan insfrastruktur, sosial budaya, sumber daya manusia, dan sumber daya alam agar tewujudnya kesejahteraan bersama serta berkelanjutan sesuai yang diharapkan masyarakat”. Maka penelitian ini ingin melihat tentang pola relasi, Interaksi, dan Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

b. Pembangunan Insfrastrutur Desa

Pembangunan desa adalah bagian dari integral pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya alam (SDA), Sumber daya pembangunan insfrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya sosial budaya dilakukan tanpa menghilangkan unsur rekognisi dan subsidiaritas. Maka dari itu Pemerintah Desa selaku pemegang kekuasaan dan

pembuat keputusan diharapkan mampu bekerja secara optimal di dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur yang ada di kalurahan.

Pasal 1 ayat (9) Permendagri Nomor 144 Tahun 2014, Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi 3 bidang yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.

Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. guna mewujudkan pengarusutamaan atau jalan menuju kesetaraan, perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Yansen (2004:1), inti keberhasilan dalam pembangunan diukur melalui :

- a) Berdasar pada visi,
- b) Dipaparkan dalam misi,
- c) Diuraikan melalui arah kebijakan pembangunanyang jelas dan terarah;
- d) Dilaksanakan ke dalam program kerja dan kegiatan;

- e) Dioperasionalisasikan melalui partisipasi yang efektif, efisien, dan bergerak.

Berdasarkan demokrasi desa pembangunan adalah suatu proses keterlibatan partisipasi masyarakat desa serta pemerintah desa melalui kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu adanya pembangunan di desa diharapkan agar mampu mencapai kesejahteraan bersama sehingga bukan hanya elite desa saja yang menikmati pembangunan tersebut. Melainkan bersama masyarakatlah agar terciptanya keadilan. Maka dari itu perlu adanya musyawarah bersama dengan masyarakat yang kemudian melahirkan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan adil, damai, dan berpihak kepada rakyat miskin.

Pedoman pembangunan desa yang tertuang pada peraturan menteri dalam negeri indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 1 ayat (9) bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menumbuhkan kesadaran bersama warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai suatu sarana untuk memperbaiki kehidupan sosial bernegara guna meningkatkan partisipasi warga desa dalam proses pembangunan maka perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah desa dan masyarakat desa dalam merancang pembangunan. Kepala desa sebagai pembuat keputusan diharapkan mampu memberikan solusi dari permasalahan

masyarakat desa, sebab pada tingkat pemerintah yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa diharapkan untuk berperan aktif dalam proses musyawarah di desa serta dalam pembangunan desa (Nurgiansah, 2020).

Secara konseptual menurut pendapat Campbell (dalam Agassi, 2013) adalah dengan pengembangan ibukota yang menggabungkan pusat pemerintah dan pusat perekonomian bisa dilakukan sesuai dengan tujuan dari pembangunan ibu kota tersebut.

Infrastruktur adalah suatu kondisi prasarana serta segala sesuatu yang merupakan penunjang utama agar supaya terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain makanya dari itu sebelum melakukan pembangunan perlu adanya planning yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dibagi yaitu 3 ruang lingkup yaitu pembangunan infrastruktur transportasi masyarakat desa guna menunjang peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yang berupa jalan, jembatan, tambatan perahu. Pembangunan yang menunjang untuk produksi pertanian berupa irigasi desa, pembangunan infrastruktur yang menunjang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air minum, sanitasi, ketentraman, dan keamanan masyarakat desa.

Sumodiningrat & Wulandari (2016) membangun desa sangat penting dilakukan mengingat desa mayoritas masyarakat tinggal di wilayah desa dengan potensi keuangan, ekonomi, serta modal sosial yang sebagian besar di wilayah pedesaan.

Thacker et al, (2019) Investasi pembangunan infrastruktur perlu dilakukan guna meningkatkan produktivitas ekonomi, lapangan pekerjaan dan menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat desa.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mempunyai teknik tertentu, dalam pengumpulan data dan dalam pengolahan data. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara yang ilmiah. sehingga mudah dipahami dan dimengerti terkait maksud serta tujuan dari peneliti. Tujuan dari cara ilmiah ialah dalam kegiatan penelitian merujuk kepada keilmuan yakni logis, terstruktur, dan praktis. metode jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif yaitu menguraikan secara rinci peneliti.

1. Jenis penelitian

Adapun jenis yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Yang merupakan peneliti memperoleh data berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang akan di amati. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan penelitian jenis deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan keadaan tertentu yang akan di teliti.

2. Unit analisis

- a) Penelitian ini berlokasi terletak di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta.
- b) objek yang akan diteliti adalah *Governance* Pemerintah Kalurahan Dalam Pembangunan Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta.
- c) Subjek penelitian atau informan dari penelitian ini adalah mengenai objek yang akan di teliti, Narasumber yang akan diteliti yaitu Kepala desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL), Kaur Perencanaan, Kasi Kesra, Ketua Karang Taruna, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK), Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK Kal), Pkk, Pelaku Usaha serta tokoh masyarakat.

Tabel 1. 1 Informan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Marsudi	43	Laki-Laki	SMP	Lurah
2	Suwardi	61	Laki-Laki	SMA	Carik
3	Ali Muslim	50	Laki-Laki	SMA	Ketua Bamuskal
4	Suryanto	46	Laki-Laki	SMA	Ketua Bamuskal
5	Tina	30	Perempuan	S-1	Kaur Kesra
6	Yani	41	Perempuan	Diploma 3	Ketua PKK
7	Erna	24	Perempuan	S-1	Ketua Karang Taruna
8	Rubikan	50	Laki-Laki	SMA	Dukuh Gunung Cilik
9	Ngadiono	50	Laki-Laki	SMP	Ketua RT 03
10	Rini	45	Perempuan	SD	Pelaku Usaha I
11	Panda	22	Perempuan	SLTA	Pelaku Usaha II
12	Sumiati	46	Perempuan	SMP	Pelaku Usaha III
13	Mujiono	47	Laki-Laki	SMP	Tokoh Masyarakat I
14	Lasinom	56	Perempuan	Diploma 3	Tokoh Masyarakat II
15	Saryanto	46	Perempuan	SMA	Tokoh Masyarakat

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Pola pengumpulan data dapat dilakukan lewat proses wawancara, obserbasi, dokumentasi serta instrumen yang diperlukan dalam memperoleh data sehingga peneliti bisa mendapatkan data secara tepat, akurat dan ilmiah.

a. Observasi/Pengamatan

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian. kemudian peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terstruktur dalam obyek penelitian. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan peneliti melakukan beberapa tahapan-tahapan adalah :

- 1) Menetapkan tempat/gejala dalam observasi penelitian.
- 2) Menetapkan gejala apa dalam observasi penelitian.
- 3) Memetakan observasi agar sesuai dengan fokus penelitian.
- 4) Membuat panduan pedoman wawancara observasi penelitian.

- 5) Menetapkan data-data observasi dari penelitian yang terdahulu maupun penelitian yang dilakukan secara langsung.
- 6) Mencatat hasil dari observasi penelitian.

Observasi yang akan diteliti mengenai Relasi Pemerintah Kalurahan Muntuk, Swasta, dan Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018,140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. kemudian teknik wawancaranya dilakukan dengan sangat terstruktur yang dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan daftar pertanyaan atau lebih fleksibel, selain itu memberikan pertanyaan kepada informan seperti introgasi pertukaran informasi dengan subjek yang diteliti dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti harus memahami tahapan-tahapan wawancara berikut ini :

- 1) Menentukan terhadap siapa saja yang akan diwawancarai.
- 2) Merancang inti dari masalah yang akan di gali lebih mendalam.
- 3) Menyampaikan maksud dan tujuan dari wawancara yang akan dilakukan.
- 4) Menyampaikan intisari dari hasil wawancara dan menutup
- 5) Mencatat hasil wawancara .
- 6) Menandai tindak lanjut dari hasil wawancara yang di dapatkan.

Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan fokus penelitian diatas yaitu Pemerintah Kalurahan Muntuk, Swasta, dan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa dimasa lalu yang telah terjadi. Dokumentasi yang diperoleh berupa tulisan, gambar, serta karya-karya ilmiah dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan penunjang dalam melakukan metode observasi wawancara dalam penelitian kualitatif. maka dari itu sumber-sumber dapat lebih dipercaya jika

didukung dengan sejarah pribadi, kehidupan masa kecil, disekolah, tempat kerja, dimasyarakat, autobiografi (Sugiono 2017: 124-125). Dokumentasi dipilih sesuai dengan yang akan diangkat penulis yaitu tentang relasi pemerintah kalurahan, phiak swasta dan masyarakat. Berikut ini hasil observasi dan wawancara dalam dokumentasi penelitian :

- 1) Profil Kalurahan Muntuk.
- 2) Dokumen hasil musyawarah.
- 3) Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Muntuk.

4. Analisis data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008,246) analisis data meliputi :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah upaya dalam pengumpulan data untuk kepentingan peneliti pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Mereduksi data merupakan mengungkapkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan. Analisis data dengan cara ini memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, sehingga bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Verifikasi/Kesimpulan

Merupakan tahap akhir dalam pengambilan kesimpulan atau verifikasi melalui hasil penelitian yang akan menjawab fokus penelitian dari semula belum jelas menjadi lebih jelas.

BAB II

PROFIL KALURAHAN MUNTUK

A. Geografis Kalurahan Muntuk

a. Batas Wilayah

Luas wilayah Kalurahan Muntuk adalah 1284,6265 ha perencanaan pembangunan kalurahan Muntuk terdiri dari 71 wilayah RT yang terbagi dalam 11 pedusunan. Kalurahan Muntuk terletak di Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Muntuk terletak pada arah timur dari pusat kota kabupaten Bantul. Jarak Kalurahan Muntuk dengan pusat kabupaten Bantul kurang lebih 25 km. Letak Kalurahan Muntuk 5 km ke arah barat dari pusat kapanewon Dlingo. Kalurahan Muntuk berbatasan dengan beberapa kalurahan antara lain kalurahan Mangunan, kalurahan Terong, kalurahan Wukirsari dan kalurahan Temuwuh.

1. Sebelah Utara : Kaluarahan Terong
2. Sebelah Timur : Kalurahan Temuwuh
3. Sebelah Selatan : Kalurahan Mangunan
4. Sebelah Barat : Kalurahan Wukirsari

a. Orbitasi

Adalah Letak suatu Daerah/Desa dengan Pusat kegiatan yang memegang peranan pening bagi arah pembangunan Desa/Daerah itu sendiri.

Berikut jarak kantor kalurahan muntuk dengan beberapa kantor

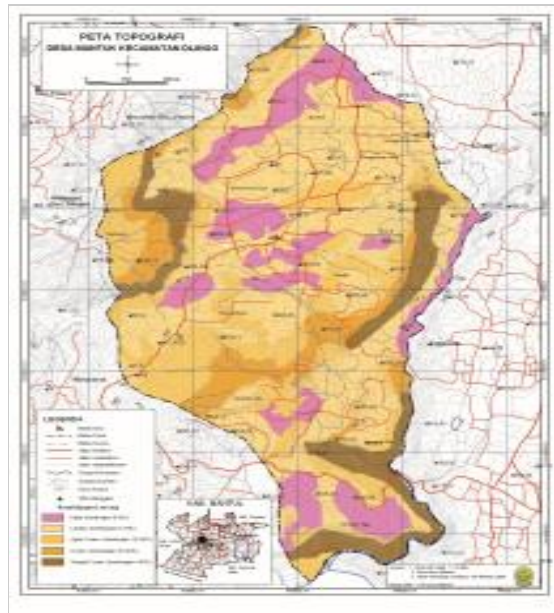
Pemerintahan :

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan Kapnewon : 7,00 Km
- 2) Jarak dari pemerintah Kota : 20,00 Km
- 3) Jarak dari kota/ibu kota Kapnewon : 20,00 Km
- 4) Jarak dari ibu Kota Provinsi : 30,00 Km

B. Kondisi Topografi

Kalurahan Muntuk terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian yang berbeda beda antar Dusun dan antar wilayah. Kalurahan ini berada pada ketinggian antara 200 s/d 500 dpl. Ketinggian antara 200 s/d 300 terdapat di Dusun Banjarharjo II Ngliseng, Seropan II, dan Seropan III. Ketinggian 300 s/d 400 terdapat di Dusun Gunung Gilik, Muntuk, Sanggrahan I, Sanggrahan II, Banjarharjo I, Banjarharjo II atas dan Tangkil, sedangkan ketinggian 400 s/d 500 terdapat di Dusun Karangasem meskipun terdapat beberapa wilayah di Dusun Karangasem memiliki ketinggian antara 300 s/d 400. Kondisi kemiringan tanah antara 200 s/d 450. Beberapa daerah yang sangat curam dapat dilihat pada peta topografi yang berwarna merah yaitu dengan kemiringan > 400 terdapat di perbatasan Banjarharjo II atas dan Banjarharjo II ngliseng sehingga menyebabkan terhambatnya akses distribusi. Sebagian besar warga yang akan berkenadaraan bermotor menuju Kalurahan Muntuk harus melalui Kapanewon Imogiri dan Kalurahan Mangunan karena tidak adanya jaringan jalan yang memadai dengan curamnya topografi dua wilayah dalam satu Dusun ini.

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Muntuk



Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Selain itu terdapat daerah yang kemiringannya lebih dari 400 yaitu memanjang dari timur Sanggrahan II hingga dusun Tangkil sehingga akses transportasi menuju kecamatan tidak bisa langsung dari Kalurahan Muntuk langsung menuju Dlingo namun harus melalui Kalurahan Kalurahan lain yang jaraknya lebih jauh yaitu melalui mangunan dan terong hal ini sangat menyulitkan masyarakat. Pada peta topografi terdapat daerah yang curam lain yaitu di sebelah timur Seropan II memanjang hingga Seropan III. Dari peta topografi tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ketinggian dan kemiringan Kalurahan Muntuk sangat menghambat pembangunan secara keseluruhan.

C. Keadaan Demografi

Adalah informasi tentang sekelompok orang menurut atribut tertentu seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan dapat mencakup faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan, status keluarga, atau pendapatan.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kalurahan Muntuk mencapai 8.822 jiwa yang terbagi dalam 3.087 kk.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	4.435
2	Perempuan	4.387
3	Total keseluruhan	8.822

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Menurut data diatas jumlah penduduk di Kalurahan Muntuk Berdasarkan Jenis kelamin maka dapat disimpulkan Bahwa Perbandingan antara Laki-Laki dan Perempuan yaitu seimbang dengan presentase Penduduk laki-laki 50% dan Perempuan 50%.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Pengelompokan penduduk berdasarkan usia di Kalurahan Muntuk dilakukan untuk mempermudah dalam menentukan sasaran pemberdayaan masyarakat. Berikut jumlah penduduk berdasarkan Usia :

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-15 Tahun	1.297
2	15-65 Tahun	6.801
3	=65 Tahun	730
4	Total	8.822

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penduduk Kalurahan Muntuk 6.801 jiwa yang berusia 15-65 tahun. Sedangkan, Jumlah penduduk terendah berdasarkan umur >65 tahun sebanyak 730 jiwa dan dapat disimpulkan juga bahwa Kalurahan Muntuk memiliki penduduk yang berusia produktif cukup banyak maka dari sumber daya manusia harus dikelola dengan sebaik mungkin.

c. Keadaan Sosial Masyarakat

Masyarakat Kalurahan Muntuk secara keseluruhan sudah mengenal pendidikan, media sosial melalui jaringan informasi internet serta jarak Kelurahan Muntuk tidak jauh dari dari Kabupaten Bantul dan Diy, masyarakat Kalurahan Muntuk sangat memegang teguh budaya gotong royong saling bahu membahu hal itu bisa dilihat ketika masyarakat Kalurahan tersebut mengadakan pesta pernikahan, warga yang berduka, dan kegiatan lainnya. Hinga sampai saat ini Kalurahan Muntuk masih mengedepankan budaya merti Dusun dan kirap budaya jawa pada setiap tahunnya di bulan juli ini dilaksanakan sebagai

rutinitas warga dan pengucapan rasa syukur kepada Tuhan yang maha esa diikuti seluruh warga Kalurahan Muntuk.

D. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat menuju pembangunan nasional untuk pemberdayaan sosial dan mengasah ilmu pengetahuan. Lewat pendidikan kita diajarkan untuk berinteraksi dan relasi dengan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, serta menumbuhkan ide dan gagasan baru. Tabel berikut ini merupakan data Kalurahan Muntuk berdasarkan tingkat pendidikan di Kalurahan Muntuk yang menggambarkan kondisi sosial penduduk setempat.

Tabel 2. 3 Jenis Pendidikan

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	410
2	SD/Sederajat	2.836
3	SMP/ sederajat	1.014
4	SMU/SMA	1.389
5	Akademi/D1-D3	49
6	Sarjana/S1	50
7	Pascasarjana/S2	2
8	Pondok Pesantren	98
9	Sekolah Luar biasa/SLB	21
10	Kursus keterampilan	73
11	Tidak Lulus	1.577
12	Tidak sekolah	1.305
Jumlah		8.822

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

diketahui bahwa masyarakat kalurahan Muntuk sadar akan pentingnya pendidikan, walaupun banyak yang tidak lulus dan tidak sekolah hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk dari 8.822 sebanyak 2.882 yang tidak lulus dan tidak Sekolah. Dengan komposisi terbanyak 3.850 jiwa masih bersekolah di SMP/Sederajat.

E. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Secara umum masyarakat kalurahan Muntuk bekerja sebagai pengerajin buluh bambu dikarenakan Kalurahan Muntuk sentra kerajinan buluh bambu sehingga masyarakat mayoritas masyarakat lebih menggantungkan hidup dengan menganyam bambu. Dimana kerajinan bambu ini menjadi ciri khas tersendiri dari Kalurahan Muntuk dari tradisi masa lampau hingga sekarang. Adapun pekerjaan lain dari masyarakat Muntuk adalah sebagai Wiraswasta/Pedagang, Tukang, Buruh Tani, Pengerajin bambu, PNS, TNI/Polri, karyawan Swasta, pensiunan, Peternak, Jasa, Pengerajin, Pekerja seni, dan Lainnya. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil/PNS	37
2	TNI/Polri	5
3	Karyawan Swasta	437
4	Wiraswasta pedagang	1.132
5	Petani	2.102
6	Tukang	987
7	Pensiunan	3
8	Peternak	21
9	Jasa	86
10	Pengerajin buluh bambu	2.830
11	Buruh Tani	861
12	Pekerja seni	1
13	Lainya	320
	Jumlah	8.822

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian dan diketahui bahwa jumlah terbanyak 2.830 penduduk Kalurahan Muntuk yang bermata pencapaian sebagai pengerajin sebanyak 28,47%, sebagai PNS adalah 0,5%. TNI/Polri adalah 0,4%, swasta 5,20% wiraswasta/pedagang 6,07%, petani 15,27%, tukang 7,36%, buruh tani 2,41%, pensiun 0,36%, peternak 0,08%, jasa 4,49%, pekerja seni 0,06% lainnya 24,46%. Jadi dapat dilihat total keseluruhan penduduk Kalurahan Muntuk sebanyak 8.822 jiwa dan didominasi oleh pengerajin buluh bambu. Kalurahan Muntuk diketahui sebagai penghasil pengerajin bulum bambu hal ini sesuai dengan ungkapan salah satu warga Kalurahan Muntuk dan beliau juga sebagai pengerajin buluh bambu yang bernama Ibu Lusinom.

Pada dasarnya kerajinan dari buluh bambu ini sebelumnya masyarakat Kalurahan Muntuk hanya menganggap ini sebagai kerja sampingan setelah

pulang dari ladang atau pekerjaan lainnya, karena didukung tempat oleh tempat wisata dengan melihat perkembangan akan tingginya permintaan kerajinan buluh bambu maka dari itu memicu masyarakat untuk berbondong-bondong belajar membuat kerajinan dari buluh bambu dijual guna menambah perekonomian masyarakat Muntuk.

a. Prasarana Kesehatan

Tabel 2. 5 Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Poskesdes	1
3	UKMB(Posyandu/Polindes)	13
Total		15

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kalurahan Muntuk tersedia banyak prasarana kesehatan dengan didirikanya Puskesmas sebanyak 1 buah, 1 buah Poskesdes dan 13 buah Posyandu/Polindes. Berdasarkan tabel tersebut diketahui juga bahwa prasarana kesehatan ditingkat Kalurahan Muntuk cukup memadai untuk melayani masyarakat Kalurahan Muntuk.

b. Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah menunjang dalam proses belajar mengajar baik langsung ataupun tidak langsung untuk mencapai tujuan dan makna pendidikan.

Tabel 2. 6 Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Perpustakaan Kalurahan	1
2	Gedung Sekolah Paud	1
3	Gedung TK	6
4	Gedung SD	6
5	Gedung SMP	2
Total		=15

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kalurahan Muntuk tersedia banyak prasarana kesehatan dengan didirikanya Puskesmas, 1 buah Poskesdes dan 13 buah Posyandu/Polindes. Berdasarkan tabel tersebut diketahui juga bahwa prasarana kesehatan ditingkat kalurahan Muntuk cukup memadai untuk melayani masyarakat Umum.

c. Prasarana Umum

Sarana umum adalah salah satu prasarana yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan warga masyarakat.

Tabel 2. 7 Prasarana Umum

No	Prasarana Umum	Jumlah
1	Olahraga	15
2	Kesehatan Budaya	5
3	Balai Pertemuan	2
4	Pasar Kalurahan	1
5	Sumur Kalurahan	1
Total		21

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa prasarana Umum yang ada di kalurahan Muntuk sebanyak 15 buah tempat Olahraga, 5 buah Gedung kesenian Budaya, 2 buah balai pertemuan, 1 buah pasar Kaluraan, dan 1 buah sumur Kalurahan. Dapat disimpulkan bahwa prasarana umum yang dimiliki Kalurahan Muntuk sudah cukup optimal sehingga dapat menunjang kegiatan sosial antar masyarakat untuk saling berinteraksi, relasi yang kemudian melahirkan hubungan kerjasama yang baik.

d. Prasarana Ibadah

Tabel 2. 8 Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	25
2	Mushola	48
3	Gereja	1
Total		74

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa prasarana ibadah yang ada di Kalurahan Muntuk, yang paling banyak adalah didominasi oleh mushola dan masjid sedangkan yang paling sedikit adalah gereja. Dapat diketahui bahwa Kelurahan Muntuk kebanyakan menganut ajaran agama islam, sedangkan penganut agama Katolik dan Kristen dengan jumlah 1 yang artinya paling sedikit. Kesimpulannya adalah bahwa Kalurahan Muntuk memfasilitasi sarana dan prasarana kepada warga masyarakat.

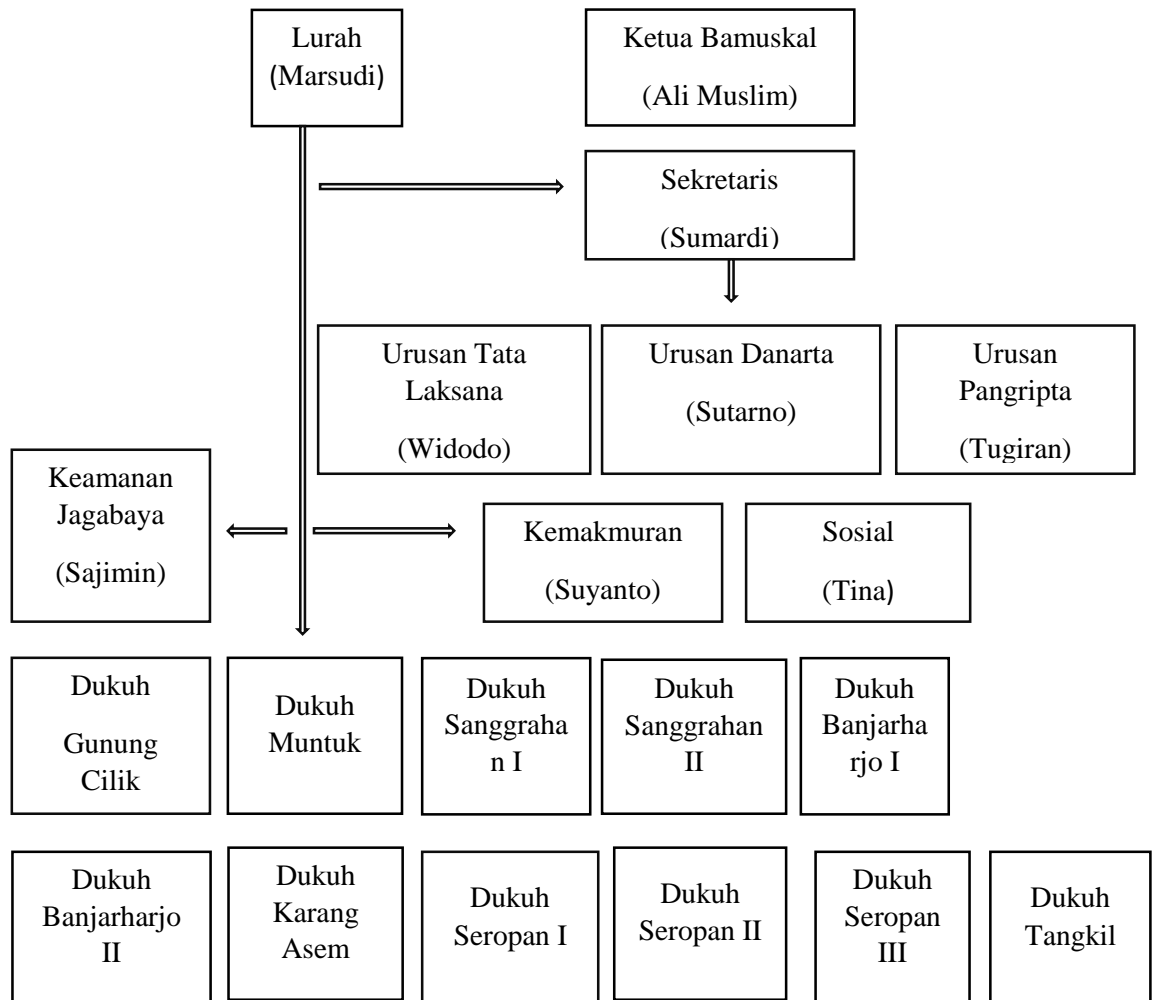
e. Kondisi Pemerintahan

Pembangunan di Kalurahan Muntuk sudah cukup memadai hal itu bisa dilihat dalam proses akses infrastruktur, sarana, dan prasarana seperti akses jalan, kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, fasilitasi olahraga dan lain-lain. Diketahui dengan adanya lapangan olahraga, rumah sekolah, perpustakaan Kalurahan, puskesmas, poskedes, UKBM (posyandu/polindes), tempat ibadah, kesenian, pasar Kalurahan, dan balai pertemuan serta jalan penghubung dari desa ke desa sudah cukup baik hanya saja belum dilakukan secara menyeluruh dikarenakan terhambat dengan sosial geografis dan biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan infrastruktur itu sendiri maka dari itu Pemerintah Kalurahan Muntuk masih terus berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan pada masyarakat Kalurahan Muntuk.

D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

Muntuk

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintah Kalurahan Muntuk



Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Visi dan Misi Kalurahan Muntuk :

1. Visi Lurah

Terwujudnya Pemerintahan Kalurahan yang demokratis, mandiri, transparan, dan akuntabel dalam kemajuan pembangunan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Di Kalurahan Muntuk.

2. Misi Lurah

- A. Mewujudkan pemerintahan yang transparan mulai dari perencanaan penganggaran dan pelaksanaan
- B. Mewujudkan pemerataan yang berkelanjutan di seluruh Kalurahan Muntuk
- C. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan BUMDes peningkatan PAD dan digitalisasi usaha produk
- D. Mencetak kader yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dan sumber Daya Manusia (SDM).

a. Kepala Desa/ Lurah:

Lurah atau kepala Desa berkedudukan sebagai kepala desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas dan fungsi kepala desa berdasarkan yang dimaksud ayat 2 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan,, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, melindungi masyarakat desa, administrasi kependudukan, serta penataan pengelolaan wilayah ,
2. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan,
3. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi, masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan,
4. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris / Carik :

Membantu Kepala Desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan pengendalian teknis dalam proses penyusunan program-program serta pengurusan administrasi umum yang meliputi ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, keputakaan, kehumasan, protokol, dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sekretaris desa memiliki 4 fungsi yaitu

1. Menyimpulkan analisis dan penyajian data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan,
2. Pelaksanaan koordinasi tentang tugas-tugas kepala-kepala urusan dan kepala dusun serta lembaga kemasyarakatan di desa,
3. Pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program serta pengurusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, keputakaan, kehumasan, protokol, dan rumah tangga,
4. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Urusan Tatalaksana/Kepala Urusan Umum :

Memiliki tugas melaksanakan tugas ketatausahaan seperti

1. Tata naskah,
2. Administrasi surat menyurat,
3. Arsip/ekspedisi,

4. Penataan administrasi perangkat desa, 5.
5. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
6. Penyiapan rapat,
7. Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum,
8. pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan,
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang umum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Urusan Danarta :

Memiliki melaksanakan dan mengelola keuangan seperti

1. Pengurusan administrasi keuangan,
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
3. Verifikasi administrasi keuangan,
4. Administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa dan lain-lain,
5. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Urusan Pangripta :

Memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti :

1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program serta menyusun laporan,
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang perencanaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

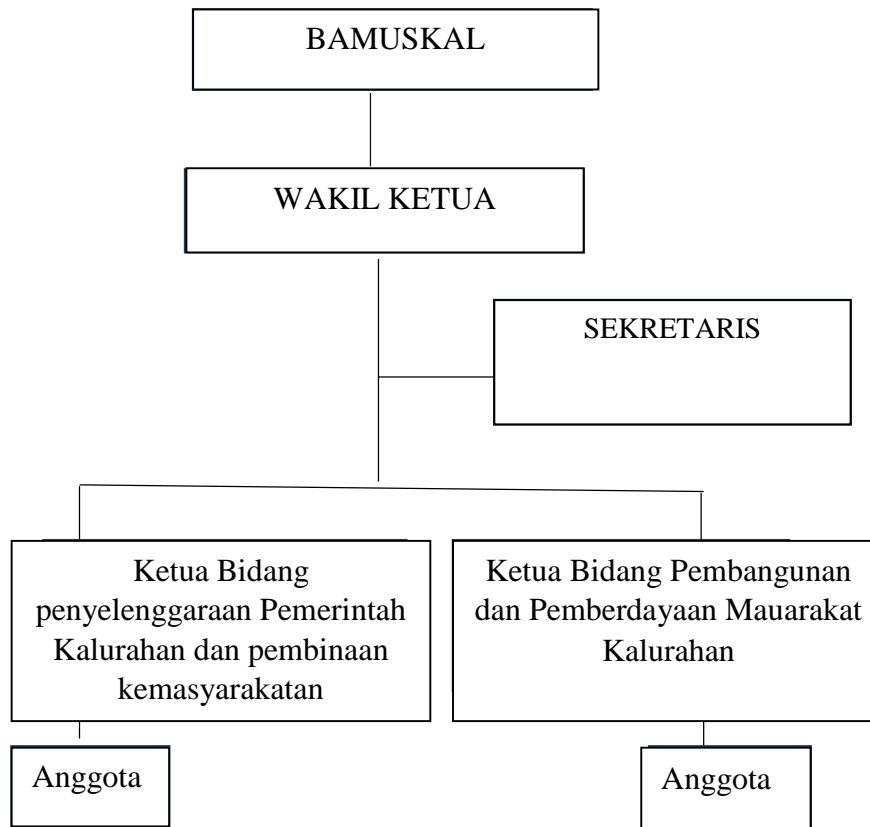
f. Keamanan Jagabaya :

1. Melakukan manajemen tata praja pemerintahan,
2. Menyusun regulasi Desa,
3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan,
4. Memastikan pembinaan ketentraman dan ketertiban,
5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat,
6. Mengelola mengatur data dan masalah kependudukan,
7. Menata dan mengelola wilayah,
8. Melakukan pendataan dan pengelolaan profil desa dan,
9. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai mekanisme yang ditentukan.

- g. Kemakmuran/Ulu-ulu :
1. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan,
 2. Melakukan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan
 3. Melakukan tugas sosialisasi memotivasi di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruna, dan
 4. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan aturan yang berlaku.
- h. Sosial/Kamitua :
1. Melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
 2. Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, melestarikan nilai-nilai budaya, masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan, dan
 3. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- i. Kepala Kewilayahan/ Dusun :
- Membantu kepala desa dalam dalam penyelenggaraan kewilayahan. Kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Menjaga ketentraman, ketertiban dalam rangka melakukan perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah,

2. Memantau pembangunan wilayahnya,
3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan rasa peka masyarakat dalam menjaga lingkungan,
4. Melaksanakan langkah-langkah pemberdayaan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam melakukan pembangunan.

Bagan 2. 2 Struktur BAMUSKal



Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

j. Badan Permusyawaratan Kalurahan/BAMUSKal :

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kelurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis tugas Bamuskal sendiri yaitu :

1. Mengelola aspirasi masyarakat,
2. Menampung aspirasi masyarakat,
3. Menyalurkan aspirasi masyarakat,
4. Menetapkan musyawarah BAMUSKal,

5. Menetapkan musyawarah Kalurahan,
6. Membentuk kepanitiaan pemilihan lurah,
7. Menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus untuk pemilihan lurah antar waktu,
8. Membahas dan menentukan rancangan peraturan kelurahan bersama Lurah,
9. Mengawasi kinerja lurah,
10. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan,
11. Menyerap serta menampung aspirasi dari masyarakat dalam proses penyelenggaraan musyawarah dalam perencanaan, mengawasi pelaksanaan, dan menyepakati peraturan kalurahan kaitannya dengan keistimewaan,
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kalurahan dan lembaga lainnya,
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi dari Bamuskal itu sendiri sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama Lurah ,
2. Melaksanakan mengawasi kinerja Lurah,
3. Mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan,
4. Melaksanakan dan turut serta dalam melaksanakan urusan keistimewaan Lurah.

a. Data Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan :

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan memiliki fungsi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengantisipasi, merawat, dan meningkatkan pembangunan dengan cara partisipatif, gotong royong, swadaya masyarakat. Kalurahan Muntuk memiliki Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Muntuk

No	Nama Lembaga	Keterangan
1.	<p>TP-PKK Kal</p> <p>a. Pengurus</p> <p>b. Anggota</p> <p>c. Kegiatan bulanan</p> <p>d. Dana untuk dikelola</p>	<p>18 orang</p> <p>32 orang</p> <p>35 kegiatan</p> <p>Rp 10.044.000</p>
2.	<p>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)</p> <p>a. Pengurus</p> <p>b. Anggota</p> <p>c. Kegiatan perbulanya</p> <p>d. Dana yang dikelola</p>	<p>8 orang</p> <p>21 orang</p> <p>1 kegiatan</p> <p>35 kegiatan</p> <p>Rp 25.632.500</p>
3.	<p>Karang Taruna</p> <p>a. Pengurus</p> <p>b. Anggota</p> <p>c. Jenis kegiatan</p>	<p>16 orang</p> <p>35 orang</p> <p>Pertemuan wajib</p>
4.	<p>Badan Usaha Milik Desa</p> <p>a. BUMDes</p> <p>b. Jenis BUMDes</p> <p>c. Modal awal BUMDes</p> <p>d. Uang yang dikelola BUMDes</p>	<p>1 buah</p> <p>Desa mark</p> <p>Rp 200.000.000</p> <p>Rp 200.000.000</p>
5	<p>RT/RW</p> <p>a. RT</p> <p>b. RW</p> <p>c. Bantuan yang diterima RT dalam sebulan</p> <p>d. Bantuan diterima RW dalam sebulan</p>	<p>71</p> <p>-</p> <p>Rp 75.000.00</p> <p>-</p>

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

Kalurahan Muntuk telah mempunyai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagai berikut pengurus, anggota, dan macam-macam kegiatan perlembagaan dan serta dana yang mendukung macam-macam kegiatan. Kesimpulannya Kalurahan Muntuk dalam proses perlembagaan sudah berjalan secara optimal.

Kalurahan Muntuk mempunyai Linmas yang beranggotakan 63 orang memiliki poskamling sebanyak 73 pos dengan adanya linmas sehingga masyarakat menjadi aman dan tentram serta terjamin keselamatannya.

b. Data Kepegawaian/Aparatur

Pegawai adalah aparatur yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam membuat aturan menata, dan menjalankan Kalurahan, agar kehidupan masyarakat yang ada di Kalurahan Muntuk menjadi lebih teratur. Berikut ini aparatur-aparatur Pemerintah Kalurahan Muntuk :

Tabel 2. 10 Kepegawaian Kalurahan Muntuk

No	Nama	Jabatan
1	Marsudi	Lurah
2	Erna Fitri Utami	Sekretaris
3	Sajimin	Ka. Sie Pemerintahan
4	Tugiran	Kaur Program
5	Widodo	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Sutarno	Kaur Keuangan
7	Suyanto	Ka. Sie Kesejahteraan
8	Giyono	Ka.Sie Pelayanan
9	Legiyo	Staf
10	Try Nuryandari	Staf
11	Sudaryanti	Staf
12	Sokiman	Staf
13	Jumanti	Staf
14	Jumakir	Staf
15	Tumirin	BPD Dapil
16	Ali Sukardi	BPD Dapil
17	Sukadi	BPD Dapil
18	Dwi Iswanto	BPD Dapil
19	Karyani	BPD Dapil
20	Yeni Farida	BPD Dapil
21	Hartono	BPD Dapil
22	Lin Widyaningsih	Tenaga Honorer
23	Wijiyanto	Tenaga Honorer
24	Siti Hnifah	Tenaga Honorer

Sumber data RPJMKal Muntuk 2023

E. Padukuhan Kalurahan Muntuk

Kalurahan Muntuk Mempunyai 11 Padukuhan. Adapun Nama-nama Dukuh yang ada di kalurahan Muntuk beserta Dukuhnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 11 Padukuhan Kalurahan Muntuk

No	Nama Dukuh	Padukuhan
1	Dukuh Gunung Cilik	Rubikan
2	Dukuh Seropan I	Joko Susilo
3	Dukuh Seropan II	Suraji
4	Dukuh Seropan III	Suratman
5	Dukuh Sanggarahan I	Zam Zainudin
6	Dukuh Sanggarahan II	Jiman
7	Dukuh Banjarharjo I	Wakhid Widadi
8	Dukuh Banjarharjo II	Asinarti
9	Dukuh Muntuk	Supardal
10	Dukuh Tangkil	Turkirin
11	Dukuh Karangasem	Tukiyo

Sumber Data RPJMKal Muntuk 2023

F. Lembaga Kemasyarakatan

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- b. Lembaga Adat
- c. BUMDes
- d. Karang Taruna
- e. RT/RW

BAB III

ANALISIS GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KALURAHAN MUNTUK

Pada bab 3 ini, Penulis akan menganalisis hasil wawancara lapangan dengan menggunakan teknik analisis data. Analisis data disini berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang akurat sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan ini sangat diharapkan dari hasil data yang sudah dianalisis mampu memberikan informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

A. Relasi Antara Pemerintah Kalurahan, Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur

Musyawarah Desa/Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan antara Pemerintah Muntuk, Bamuskal, dan Unsur-unsur Masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penataan Desa. Di dalam Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Bamuskal diharapkan kehadiran semua unsur masyarakat supaya masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut bisa menyampaikan aspirasi, membahas dan kemudian menetapkan secara bersama-sama sesuai mekanisme yang berlaku. Relasi merupakan Hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Dalam musyawarah relasi menjadi sangat penting karena dengan adanya relasi masyarakat lebih mudah mencapai kesepakatan bersama, mempengaruhi seseorang atau pihak lain untuk mengikuti kehendak yang kita harapkan bersama-sama. Pentingnya

pembangunan infrastruktur Di Kalurahan ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kalurahan. Pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, Maka dari itu sangat diharapkan antara Pemerintah Kalurahan Muntuk, Masyarakat dan pihak swasta agar mampu bekerjasama sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul DIY.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Marsudi (43) selaku Lurah Kalurahan Muntuk mengatakan :

Di Kalurahan Muntuk mas, kami selalu menjaga harmonisasi tersebut terbukti bahwa Di Kalurahan Muntuk ini baru ada peningkatan kapasitas kampung siaga bencana (KSB) dan forum penanggulangan resiko bencana, ada Karang Taruna, ada Desa Budaya dan dikalurahan Muntuk ini banyak sekali kelompok masyarakat Desa pleneur Desa prima, Desa Budaya, dan desa wisata semua ini termasuk jalinan komunikasi kami agar seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha atau pihak swasta dengan kebutuhannya itu kami bisa menjangkau dengan sebaik-baiknya karena kebutuhan petani belum tentu sama dengan kebutuhan pengerajin begitupun sebaliknya dan lain-lain. (Wawancara, 18 Juni 2023).

Dari pernyataan Bapak Marsudi selaku Lurah Kalurahan Muntuk dapat diketahui bahwa relasi dengan masyarakat dan pelaku usaha sudah berjalan dengan baik hal itu dibuktikan dengan dibentuknya lembaga atau forum masyarakat seperti kampung siaga bencana (KSB), Forum resiko penanggulangan bencana (FRPB), karang

taruna, desa budaya, desa prima dan desa wisata. Tujuan dari perlembagaan ini agar hubungan komunikasi elemen-elemen masyarakat serta pelaku usaha bisa dengan mudah masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui forum tersebut dan tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ali Muslim (50) selaku ketua BAMUSKal mengatakan :

“Hubungan Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan pelaku usaha sudah berjalan dengan baik mas, karena setiap akan melakukan pembangunan infrastruktur maupun diadakannya kegiatan-kegiatan selalu diadakan dengan pertemuan musyawarah terlebih dahulu serta koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan, RT/RW, BAMUKal, masyarakat, pelaku usaha dan Pamong Kalurahan nah, seperti contoh mas pembangunan program-program sebelumnya itu dana desa mekanismenya dengan musyawarah terlebih dahulu. Dalam proses melakukan pembangunan infrastruktur kami selaku BAMUSKal juga pernah melakukan kesalahan sedikit dan biasanya kami langsung atasi lewat mekanisme yang telah di sepaki antara pemerintah kalurahan, masyarakat dan bamuskal begitu mas”. (Wawancara, 18 Juni 2023).

Dari hasil wawancara dengan Pak Ali Muslim selaku ketua BAMUSKal, maka dapat diketahui bahwa relasi pemerintah kalurahan sudah berjalan dengan baik karena mereka bersinergi dan tentunya relasi yang baik itu juga karena pemahaman tentang mekanisme terhadap regulasi dan taat akan peraturan-peraturan. Badan Musyawarah Kalurahan memiliki tugas dan fungsi yang mengatur tentang melaksanakan musyawarah kalurahan seperti musyawarah perencanaan. Badan Musyawarah Kalurahan mengelola aspirasi

masyarakat yang dilakukan dengan musyawarah dusun untuk menampung usulan yang merupakan aspirasi masyarakat dan setelah dihimpun maka akan disalurkan di dalam musyawarah dukuh, Pemerintah Kalurahan, Badan Musyawarah Kalurahan, dan unsur masyarakat dilakukan kesepakatan mengenai hal-hal yang sifatnya strategis. Dari penjelasan diatas tentu saja dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa secara politik. Musyawarah Kalurahan merupakan tugas dari Badan Musyawarah Kalurahan maka dari itu pentingnya Badan Musyawarah Kalurahan serta fungsinya di dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan kinerja kepala desa

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suwardi (61) selaku carik (sekretaris) mengatakan :

“sebelum kita melangkah dalam melakukan pembangunan infrastruktur tentunya berdasarkan ada usulan, musyawarah dulu ditingkat padukuhan atau musdus kita libatkan contoh Bamuskal, Ulu-ulu, RT/RW, Lembaga kalurahan, masyarakat, dan pelaku usaha kemudian di sampaikan ke pemerintah kalurahan yang menjadi prioritas padukuhan itu apa? air bersih misalnya. Kalo sudah disepakati bersama masyarakat pemerintah kalurahan apabila nanti sudah masuk di APBKal kita akan laksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku. Sebelum dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu, pelaksanaan kegiatan apa ya setelah itu gotong royong kerjasama. Pemerintah Kalurahan itu mengalokasikan dana untuk kegiatan di

masyarakat dan kemudian masyarakatlah yang mengerjakan kegiatannya untuk kerjasama seperti itu”. (Wawancara, 18 Juni 2023).

Dari hasil wawancara bersama Bapak Suwardi selaku carik, maka dapat diketahui bahwa relasi pemerintah kalurahan antar lembaga dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di kalurahan muntuk, dimana dalam proses pembangunan infrastruktur pemerintah kalurahan Muntuk sudah melibatkan seperti masyarakat, pihak swasta beserta lembaga-lembaga yang ada di kalurahan tujuannya adalah melalui kerjasama yang baik akan melahirkan pembangunan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat desa dalam proses pembangunan infrastruktur kalurahan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suyanto (51) selaku Ulu-ulu/Pembangunan mengatakan :

“Jadi begini mas untuk masalah pembangunan infrastruktur sudah terintegrasi dengan baik. Ya sebelum kita melakukan realisasi pembangunan infrastruktur kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada elemen masyarakat, RT/RW, lembaga masyarakat kalurahan, dan Bamuskal itu program apa ?, dari apa?, seperti apa pekerjaannya, kita sosialisasikan terlebih dahulu, setelah nanti sosialisasi terjadi persetujuan e di musyawarah itu nanti baru kita realisasikan kan ada. (Wawancara, 22 Juni 2023).

Pendapat diatas sejalan dengan pendapat diatas sejalan dengan salah satu tokoh masyarakat Ibu Lasinom (56) mengatakan :

“Biasanya disosialisasikan dan di musyawarahkan dulu mas lewat RT/RW serta Dukuh sebelum melakukan pembangunan. Dalam melakukan musyawarah di kalurahan aspirasi kami sebagai masyarakat

juga didengar sama pemerintah kalurahan muntuk. (Wawancara, 22 Juni 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. relasi serta hubungan adalah kerjasama untuk mencari solusi dalam sebuah masalah dan mengevaluasi pembangunan serta kemudian merencanakan kegiatan pembangunan desa kedepannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan bersama Ibu Tina (30) selaku kamituwo/ kasi kersa mengatakan :

“Terkait relasi ya mas, kami mendengarkan usulan-usulan dari padukuhan, RT/RW, Bamuskal, dan Lembaga masyarakat kalurahan apa yang menjadi prioritas pembangunan, seperti misalnya ada pembangunan lapangan itu juga masuk ke kami selaku pemerintahan kalurahan. Nah ketika sudah masuk ke kalurahan dari skala prioritas itu nanti kita lihat di masing-masing padukuhan itu yang mana pembangunan yang perlu di prioritaskan, sebelum ke masyarakat kita akan musyawarah dulu kemudian kita nanti melakukan musdus untuk menyerap aspirasi warga masyarakat dari aspirasi tersebut yang nantinya akan dibawa ke kalurahan sebelum akan dilakukan pembangunan, tujuan dari pembangunan infrastruktur sendiri untuk memperlancar ekonomi warga masyarakat gitu mas”. (Wawancara, 23 Juni 2023).

Dari hasil wawancara bersama Ibu Tina selaku Kamituo/kasi kersa maka dapat di ketahui bahwa hubungan antara pemerintah kalurahan muntuk, masyarakat, dan lembaga kalurahan muntuk sudah berjalan baik. Hal itu di buktikan pada saat proses pembangunan infrastruktur dimana pemerintahan

kalurahan muntuk telah melibatkan unsur masyarakat, dukuh, Bamuskal, RT/RT, dan Lembaga pemerintah kalurahan dalam pembangunan infrastruktur. Melalui jalur musyawarah dan mufakat agar masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan aspirasinya tersebut.

Wawancara bersama Ibu Yani (41) selaku Ketua PKK mengatakan :

“Sepanjang ini setau saya berjalan sangat baik mas terbukti dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan itu pemerintah kalurahan muntuk selalu berkoordinasi terlebih dahulu seperti tingkat RT/RW, Dukuh, Bamuskal, tokoh masyarakat, lembaga Kalurahan dan lain-lain supaya nanti musyawarahnya bisa aman serta lancar karena kita sudah melibatkan jadi gitu mas”. (Wawancara, 23 Juni 2023).

Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Bapak Ngadiono (56) selaku Ketua RT 03 mengatakan :

“Intinya selalu baiklah rukun, kami diundang dalam musyawarah pembangunan, selama ini lewat proposal kalo mau mengajukan pembangunan dilingkungan RT, kalo pembangunan yang dari pemerintah ada padat karya, nanti yang terlibat dalam pembangunan ada Dukuh, RT/RW, perwakilan masyarakat serta Pemerintah Kalurahan. Disini tuh goyong royong kerja baktinya masih kental mas misalnya kalo ada yang meninggal warga kalurahan itu libur meninggalkan kerjanya untuk menolong orang yang lagi berduka mas”. (Wawancara, 23 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara diatas relasi dan hubungan timbal balik antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat kalurahan muntuk sudah berjalan cukup baik, dimana terjalannya komunikasi antar pemerintah kalurahan, masyarakat dan lembaga kalurahan dalam proses pembangunan infrastruktur. Relasi yang baik akan mendorong percepatan kegiatan penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan,

pembinaan kemasyarakatan kalurahan dan pemberdayaan kalurahan yang berdaya guna sehingga sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara bersama Ibu Erna (24) selaku ketua Karang Taruna mengatakan :

“kalo biasanya itu kan masyarakat mengajukan program atau proposal yaitu biasanya mengajukan melalui penjangkaran aspirasi yang dilakukan masyarakat di tingkat-tingkat Dukuh, Bamuskal yang fungsinya itu menyerap aspirasi atau masukan program dari masyarakat setelah itu masyarakat biasanya lewat Pak Dukuh menyusun proposal yang menuju nanti dari Bamuskal biasanya diusul di desa setelah itu baru masuk RKP jadi begitu mas. (Wawancara, 23 Juni 2023).

Dari pendapat diatas sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Rubikan (45) selaku Dukuh Gunung cilik mengatakan :

“cukup erat dan cukup dekat terutama dari pemerintah selalu meninjau kebutuhan- kebutuhan masyarakat dan juga pembangunan insfrastruktur dan lain-lain intinya hubungan pemerintah dengan warga masyarakat cukup baik mas. Mekanisme pembangunan insfrastruktur itu dari usulan serta memetakan masukan warga masyarakat baik padukuhan 1 sampai 11 yang mana perlu kita bangun yang paling utama loh bersama dengan masyarakat terus masuk tim pelaksana kalurahan muntuk (PK) yang terjun kelapangan itu Tim pelaksana kegiatan (TPK) Dibantu oleh masyarakat dalam pelaksanaannya selama itu begitu mas alurnya”. (Wawancara, 24 Juni 2023).

Pentingnya mengelola hubungan yang baik antara pemerintah kalurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka memudahkan pada proses menghimpun, mengidentifikasi, dan menyerap aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan insfrastruktur, perencanaan pembangunan insfrastruktur dan pelaksanaan

pembangunan infrastruktur yang ada di kalurahan muntuk. Pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan dalam upaya mengembangkan kemandirian desa untuk meningkatkan pengetahuan, pemanfaatan sumber daya alam, program kegiatan, pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Wawancara bersama Bapak Rusmadi (52) selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muntuk (LPMK) :

“Setau saya mas sudah berjalan sebagai mana mestinya tentang hubungan kerjasama, kami selaku LPMK bekerja sama dengan pihak masyarakat, Bamuskal, RT/RW, Dukuh, dan Pemerintah Kalurahan Muntuk dalam mewujudkan serta menampung masukan dari masyarakat karena menurut saya masukan dari masyarakat itu sangat penting supaya masalah-masalah yang ada dikalurahan itu bisa dipecahkan secara baik”. (Wawancara, 24 Juni 2023).

Pendapat Bapak Rusmadi sejalan pendapat Ibu Haryati (48) selaku pelaku usaha :

“Se pengetahuan saya sudah berjalan baik mas, melakukan musyawarah musyawarah dulu baru mufakat biasanya ada pertemuan dari RT, Dukuh, Bamuskal, baru ke Kalurahan”. (Wawancara, 25 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa relasi hubungan lembaga kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan bahwa adanya kerjasama yang melibatkan unsur masyarakat, Pemerintah Kalurahan dan RT/RW. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) lembaga ini dibentuk atas kesadaran prakarsa dan swadaya dari masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengelola dan menampung aspirasi masyarakat, dan

penanaman rasa semangat persatuan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh UUD 1945.

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa relasi adalah hubungan kerjasama antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pihak swasta dalam pembangunan insfrastruktur Kalurahan Muntuk itu merupakan check and balances serta adanya aspirasi masyarakat yang dihormati dapat menciptakan hubungan kerjasama demokratis. Dari hasil wawancara serta pengamatan yang dilakukan bahwa adanya kemitraan didalam menjalankan tugas, fungsi wewenang antar lembaga. Kemitraan yang dibangun Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan lembaga dapat diketahui sudah berkolaborasi dan berkesinambungan pemerintah kalurahan muntuk dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah secara bersama sama gotong royong berkoordinasi memfasilitasi dan mengingatkan supaya tujuan dari pembangunan insfrastruktur Kalurahan Muntuk sangat-sangat mempunyai dampak baik bagi masyarakat.

B. Interaksi Antara Pemerintah Kalurahan, Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur

Interaksi dalam hal ini merupakan tindakan hubungan timbal balik yang terjadi saling mempengaruhi oleh Pemerintah Kalurahan muntuk dalam hal mengelola aspirasi, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan yang kebutuhan masyarakat Kalurahan Muntuk. Dengan adanya interaksi tersebut Masyarakat Kalurahan Muntuk lebih leluasa di dalam

mengemukakan ide serta gagasan yang ingin disampaikan. Maka dari itu Pemerintah Kalurahan Muntuk bersama-sama mewujudkan desa yang mandiri berdaya guna secara sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur pembangunan dan sumber daya sosial budaya supaya tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Marsudi (43) selaku Lurah Kalurahan Muntuk mengatakan :

“Di Kalurahan Muntuk ini baru ada peningkatan kapasitas kampung siaga bencana (KSB) dan forum penanggulangan resiko bencana ada Karang taruna ada Karang Taruna, ada Desa Budaya dan dikalurahan Muntuk ini banyak sekali kelompok masyarakat Desa blender, Desa prima, Desa Budaya, dan desa wisata semua ini termasuk jalinan komunikasi kami agar seluruh elemen masyarakat dengan kebutuhannya itu kami bisa menjangkau dengan sebaik-baiknya karena kebutuhan petani belum tentu sama dengan kebutuhan pengerajin begitupun sebaliknya dan lain-lain.” (Wawancara 18 Juni 2023)

Pendapat dari Bapak Marsudi selaku Lurah Muntuk sejalan dengan pendapat warga masyarakat Ibu Ningsih yang mengatakan :

“kalo menurut saya sudah berjalan baik mas, dalam pembangunan biasanya dilakukan musyawarah baru mufakat dari pemerintah kalurahan bersama masyarakat seperti pembangunan budaya, wisata, pendidikan paud, kesehatan, dan dari segi manusianya diberdayakan untuk kreatif serta mandiri mas”.(Wawancara, 18 Juni 2023).

Pemerintah Kalurahan Muntuk mendorong demokratisasi kalurahan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Tentu hal ini memudahkan masyarakat kalurahan muntuk dalam menyampaikan aspirasinya. Mereka dalam menyatakan aspiranya lewat musyawarah yang kemudian

memberikan efektifitas dalam rangka pembangunan insfrastruktur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa memberikan ruang kepada Pemerintah Kalurahan/Desa dalam mengelola dan mengembangkan warga masyarakatnya melalui Undang-Undang ini, Kalurahan Muntuk dapat bertumbuh, semakin maju, berdaya guna, mandiri, gotong royong dan kuatnya demokrasi di Kalurahan Muntuk. Pemerintah Kaluarahan Muntuk berupaya mendorong seluruh unsur masyarakat untuk memperoleh keadilan yang setara serta hak-hak sebagai warga masyarakat dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Wawancara bersama Bapak Rubikan (50) selaku Dukuh gunung cilik mengatakan :

“Masyarakat dan pemerintah sungguh erat cukup dekatlah masih mengedepankan semangat kerja gotong royong mas, mekanismenya berdasarkan usulan warga masyarakat RT, Padukuhan Lembaga Desa dan nanti baru di Kalurahan, baru nanti melihat pembangunan apa yang dibutuhkan di kalurahan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat.” (Wawancara, 18 Juni 2023).

Dengan adanya interaksi yang baik tentu akan lebih mudah masyarakat dalam mengelola aspirasinya sesuai dengan apa yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atas asas rekognisi dan subsidiaritas untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana yang di ketahui bahwa setiap yang di tetapkan oleh Pemerintah Kalurahan Muntuk harus di sosialisasikan terlebih dahulu sebagai pihak yang di kenai dampak tersebut. Transparansi Pemerintah menjadi sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat Pemerintah selaku pembuat

keputusan di level masyarakat harus mampu melindungi dan mengayomi warga masyarakat supaya terciptanya kesejahteraan warga desa yang mandiri serta berdaya guna bagi negara Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Saryanto (46) selaku tokoh masyarakat Kalurahan Muntuk :

“ Di Kalurahan Muntuk ada 11 Dukuh jadi dana desa nya di bagi rata loh mas, ada gotong royong dan padat karya terus nanti di sampaikan lewat usulan warga masyarakat, RT/RW, Dukuh, Bamuskal, baru di putuskan di Kalurahan misalnya RT mana yang belum di bangun nanti masyarakat ada menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Kalurahan Muntuk gitu mas klo dari saya”. (wawancara, 18 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara Bersama Ali Muslim (50) selaku Ketua Bamuskal mengatakan :

“sejauh ini berjalan sangat baik sekali mas kita setiap melakukan pembangunan musyawarah terlebih dahulu bersama Masyarakat, Dukuh, Bamuskal, Pamong Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan misalnya klo ada kesalahan-kesalahan dalam pembangunan infrastruktur itu pasti sesegera mungkin kita atasi bersama dengan masyarakat supaya masalahnya bisa ada jalan ketemunya . Di Kalurahan Muntuk sudah jalan beberapa periode tetap ada kegiatan yang berkaitan dengan mengeluarkan dana APBKal dan Dana Desa itu dengan mekanisme itu dengan musyawarah terlebih koordinasi Bamuskal dan dengan Pamong Kalurahan Muntuk.”(Wawancara, 18 Juni 2023)

Pernyataan dari Bapak Ali Muslim sejalan dengan pendapatnya Ibu Sumiati (46) Selaku Pelaku Usaha mengatakan :

“akhir-akhir ini berjalan baik Bapak Lurahnya cukup energik mas, setiap akan melakukan pembangunan infrastruktur selalu musyawarah dalam melakukan pembangunan juga masyarakat disini gotong-royong dan juga ya mas terlebih dahulu melakukan musyawarah di tingkat RT, Lembaga Kalurahan, masyarakat dan Pemerintah Kalurahan. Misalnya

yang saya contohkan jalan ini jalan ini kan jalan buntu ini RT 02 ini terus aa, dari masyarakat dan Pemerintah Kalurahan sama-sama berembuk untuk dijadikan Desa wisata itu yang satu contoh ya itu dari Pak Lurah ya beliau memberi semangat untuk warga disini juga mendukung sepenuhnya untuk terlaksananya pembangunan di wilayah RT 02 mas”.(Wawancara, 19 Juni 2023).

Berdasarkan paparan diatas, bahwa interaksi Pembangunan Insfrastruktur Kalurahan Muntuk sudah tersosialisasi dengan baik hal itu bisa dilihat dimana pemerintah kalurahan muntuk dalam proses pembangunan insfrastruktur membuka ruang demokratis bagi warga masyarakat. Interaksi serta partisipasi sangat penting di lakukan oleh masyarakat dan pemerintah kalurahan karena disitu sebagai ruang demakrasi bagi masyarakat desa, keikutsertaan dan memeberikan pengaruh keikutsertaan masyarakat akan terjadi ketika yang pertama masyarakat memiliki kesadaran sebagai warga masyarakat dan lingkungan sehingga mereka memiliki keinginan berperan serta adanya ruang untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Rusmadi (52) selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mengatakan :

“kita selaku LPMK menjalankan tugas yang diberikan masyarakat Kalurahan Muntuk kepada kita dengan sebaik mungkin lalu cara apa yaitu mengelola aspirasi dari masyarakat mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, contoh ya mas dalam pembangunan insfrastruktur beberapa hari yang lalu pemerintah bersama masyarakat secara gotong royong membuat tempat untuk air dam (air bersih) untuk tanpa ada gaji sepeserpu, Di muntuk ini kita menjaga rasa persaudaraan, harmonis, ora pamrih, menghormati perbedaan-perdeaan agama, ras dan semangat gotong royong”.(Wawancara, 20 Juni 2023).

Pendapat dari Bapak Rusmadi sejalan dengan pendapat Ibu Panda

(24) Pelaku Usaha Mengatakan :

“Selama ini sudah baik sekali mas, dimana pada saat musyawarah baik ditingkat RT, Dukuh, dan Pemerintah Kalurahan itu sendiri, kami selaku pelaku usaha dilibat dalam menyampaikan aspirasi. Disini kita saling bekerjasama membangun Kalurahan Muntuk agar maju seperti Kalurahan yang lainnya yang ada Di bantu ini loh mas. Misalnya pengerajin dari buluh bambu mas kalau ada masyarakat atau orang luar yang mempunyai keinginan untuk belajar itu di sediakan wadahnya loh mas dari Pemerintah Kalurahan ”.(Wawancara, 21 Juni 2023).

Untuk menumbuhkan kesadaran bersama warga Kalurahan mengenai pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai suatu sarana untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat Kalurahan Muntuk guna meningkatkan interaksi dan partisipasi masyarakat Kalurahan akan pentingnya dalam proses pembangunan infrastruktur maka perlu kerjasama antar Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan dalam menyelenggarakan pembangunan hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan tentang pedoman pembangunan desa yang tertuang pada peraturan menteri dalam Negeri Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 1 ayat 9 pembangunan desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi masyarakat Desa.

Wawancara bersama Ibu Erna (24) selaku ketua Karang Taruna mengatakan :

“Baik mas, biasanya itu kita menjalankan program kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat dari level RT, Dukuh, Masyarakat,

Dan baru ke Pemerintah Kalurahan nanti di musyawarahkan bersama masyarakat juga tujuannya itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Muntuk”. (Wawancara, 22 Juni 2023).

Pendapat dari Ibu Erna sejalan dengan pendapat Bapak Ngadiono selaku ketua RT 03 yang mengatakan :

“Lancar mas untuk sejauh ini, kalo Pemerintah Kalurahan membuat kegiatan selalu melibatkan masyarakat Kalurahan, kita disini masih kerja gotong royong, padat karya, dan musyawarah musdus di tiap bulanya, tadi malam di rumah saya jam 19.00 wib yang hadir Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan masyarakat untuk berembuk jalan mana yang menjadi prioritas yang akan dibangun karena ngak mungkin semua jalan disini dibangun mas pasti nanti akan bertahap mas”. (Wawancara, 23 Juni 2023).

Interaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Muntuk sudah cukup baik dalam mengelola aspirasinya sesuai dengan apa yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atas asas rekognisi dan subsidiaritas untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menjalankan pembangunan insfrastruktur, Kalurahan Muntuk melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat dengan mekanisme rapat per RT, Dukuh dan nantinya hasil rapat akan dibawa ke Pemerintah untuk dilakukan Pemetaan tentang pembangunan insfrastruktur apa yang dibutuhkan masyarakat hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

C. Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur Kalurahan Muntuk merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Pembangunan Insfrastruktur Pembangunan, dan Pembangunan Sosial Budaya. Dalam menjalankan roda Pemerintahan dari segi ekonomi maupun pembangunan pemerintah Kalurahan Muntuk harus menjamin kebebasan, melindungi, dan mengayomi masyarakatnya dengan cara tanpa menghilangkan unsur rekognisi dan subsidiaritas itu sendiri. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan untuk kesejahteraan masyarakat desa dalam 3 bidang yaitu Penyelenggaraan, Perencanaan, Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam rangka mewujudkan demokrasi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan hendaknya membuat komitmen yang kolektif melalui musyawarah dan mufakat bersama secara transparan, akuntabel dan efisien. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan insfrastruktur adalah memberikan pemahaman masyarakat Kalurahan Muntuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mengenai kebutuhan-kebutuhan, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan adalah hal pertama dalam masyarakat untuk bisa mengembangkan diri secara ekonomi menuju kesejahteraannya yang adil dan beradab. Masyarakat harus mampu memetakan situasi dan kondisi tentang masalah pembangunan insfrastruktur yang bersifat kolektif strategis. Warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban serta dituntut untuk berperan aktif

bersama Pemerintah Kalurahan Muntuk mencari solusi dari permasalahannya secara demokratis untuk menuju kesejahteraan bersama sesuai dengan yang di amanatkan oleh UUD 1945.

Adapun faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur Kalurahan Muntuk berdasarkan observasi, wawancara dan pengamatan Peneliti menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan Muntuk belum mampu menjangkau pemerataan pembangunan infrastruktur salah satunya akses jalan menuju pusat ekonomi masyarakat masih belum merata dilakukan perbaikan pembangunan. Hal itu karena Pemerintah Kalurahan Muntuk masih memiliki prioritas dalam pembangunan infrastruktur Kalurahan itu sendiri hal itu di perkuat oleh beberapa informant yang saya wawancarai Di Kalurahan Muntuk.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Marsudi (43) selaku Lurah Kalurahan Muntuk mengatakan :

“Pertama luas wilayah secaa sosial geografis daerah perbukitan dan terjal toh mas kedua pembiayaan dalam pembangunan insfrastruktur yang belum cukup buat pemerataan pembangunan insfrastruktur contohnya jalan per RT, Jembatan, maupun itu irigasi belum bisa dilakukan secara merata maka dari itu kami selaku Pemerintah Kalurahan Muntuk bersama-sama dengan masyarakat melakukan musyawarah serta mufakat mana pembangunan yang akan di prioritas dan melaksanakan pembangunan secara bertahap gitu mas”. (Wawancara, 23 Juni 2023).

Pernyataan bersama Bapak Lurah sejalan dengan Pendapat Bapak Mujiono (47) Warga Masyarakat Kalurahan Muntuk mengatakan :

“Menurut saya mas luas wilayah kelurahan Muntuk itu bukit dan terjal sama biaya pembangunan, makanya akses jalan menuju rumah warga dan jalan ke pertanian itu masih ada yang belum dilakukan

pemerataan pembangunan infrastruktur, berdasarkan musyawarah masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan infrastruktur kemarin akan dilakukan bertahap-tahap dan ada pembangunan infrastruktur yang di prioritaskan”. (Wawancara, 23 Juni 2023).

Pendapat dari Bapak Mujiono (56) di perkuat oleh Bapak Rubikan selaku Dukuh Gunung Cilik mengatakan :

“Kendalanya minim mas pertama karena luas wilayah Muntuk ini sangat luas perbukitan mas, berdasarkan rapat antar RT, Dukuh, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap-tahap jadi tidak mungkin toh dilakukan secara sekaligus pasti ada yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. (Wawancara, 23 Juni 2023).

Begitu juga pendapat bersama Bapak Ngadiono selaku RT 03 yang mengatakan

“Perbaiki jalan mas daerah disini luas dan bukit tentu akan memerlukan waktu yang panjang dalam membangunnya ke rumah warga dan ke pertanian, Kemarin sudah kami musyawarahkan sama-sama masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Muntuk dan titik terangnya adalah akan di bangun secara bertahap-tahap sesuai dengan dana yang dianggarkan”. (Wawancara, 24 Juni 2023).

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Di Kalurahan Muntuk mengalami beberapa kendala yaitu akses jalan menuju RT dan akses jalan menuju sumber pertanian belum dilakukan secara menyeluruh, untuk sementara waktu masih dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Kalurahan Muntuk. Faktor penghambat juga ditemukan dalam pembangunan infrastruktur yaitu Relasi serta Interaksi dari Pemerintah Kalurahan Muntuk belum mampu terjangkau secara optimal baik relasi serta interaksi ke Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintahan Provinsi, volume Demografis luas wilayah luas yang mengharuskan Pemerintah Kalurahan

Muntuk untuk melakukan pembangunan secara bertahap dengan memetakan pembangunan infrastruktur apa yang paling dibutuhkan masyarakat Kalurahan.

Wawancara bersama Bapak Ali Muslim selaku ketua Bamuskal mengatakan :

“kendalanya luas wilayah dan biaya...ya akses jalan mas terutama soalnya belum dilakukan pemerataan atau menyeluruh dilakukan perbaikan, menuju pertanian dan rumah warga belum semuanya bisa dijangkau untuk di perbaiki semua berdasarkan dari musyawarah kemarin waktu rapat ya mas mengenai jalan akan diperbaiki secara bertahap karena menyesuaikan luas wilayah, dana desa, dan kebutuhan dasar pada masyarakat yang menjadi prioritas”, (Wawancara, 24 Juni 2023).

Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Ibu Rini (45) selaku pelaku usaha mengatakan:

“jalan menuju sumber ekonomi warga rusak mas belum dilakukan secara merata”. (Wawancara, 24 Juni 2023).

Sementara itu pendapat Ibu Erna (24) selaku Ketua Karang Taruna mengatakan:

“Faktornya itu pertama luas wilayah disini, belum adanya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, dan biaya dana yang dikeluarkan itu belum mampu menjangkau dalam proses pemerataan pembangunan infrastruktur itu sendiri mas.” (Wawancara 24 Juni 2023).

Kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Kalurahan Muntuk dalam pembangunan infrastruktur pertama adalah luas wilayah Kalurahan Muntuk yang berkisar 1284,6265 ha, terdiri dari 71 wilayah RT yang terbagi dalam 11 pedusunan sehingga dana yang dikeluarkan belum mampu menjangkau

pemerataan pembangunan insfrastruktur, dan kedua belum adanya pembebasan lahan dari Warga Masyarakat ke Pemerintah Kalurahan Muntuk untuk pembangunan insfrastruktur sehingga menyebabkan pembangunan.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kalurahan Muntuk berupaya menjalin komunikasi kerjasama antar lembaga, merencanakan pembangunan insfrastruktur secara terstruktur, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan insfrastruktur. Insfrastruktur Di Kalurahan Muntuk. Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan Muntuk mencoba secara bersama-sama dalam membangun relasi serta Interaksi dengan pihak Swasta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi Yogyakarta agar mampu secara bersama-sama secara kolektif menyelesaikan masalah dalam pembangunan insfrastruktur Di Kalurahan Muntuk.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis deskriptif pada bab sebelumnya relasi, interaksi dan faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur Pemerintah Kalurahan Muntuk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Relasi Pemerintah Kalurahan Muntuk dalam pembangunan Infrastruktur sudah cukup optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Kalurahan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat di Kalurahan.
2. Interaksi Pemerintah Kalurahan Muntuk Dalam Pembangunan Infrastruktur sudah berjalan sangat baik hal itu bisa di lihat dalam proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui Musyawarah Dusun, Musyawarah Kalurahan, Musyawarah dan Musyawarah Rencana Pembangunan. Pemerintah Kalurahan Muntuk melakukan musyawarah terlebih dahulu melibatkan perwakilan Masyarakat, karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKal), Ketua RT, Ketua PKK, dan Dukuh.
3. Faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur Masalah pembiayaan yang dimana luas wilayah perbukitan dan terjal sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terkendala Maka dari itu Pemerintah Kalurahan Muntuk memetakakan

pembangunan infrastruktur apa yang dibutuhkan masyarakat serta akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, Saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan baik dari Pemerintah Kalurahan, Masyarakat, Swasta Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pembangunan infrastruktur. Baik pembangunan infrastruktur berupa fisik maupun non fisik dengan tujuan agar pembangunan infrastruktur menjadi merata sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pemerintah Kalurahan Muntuk yang berwenang mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas serta menjunjung tinggi nilai- nilai demokrasi yang ada Di Kalurahan Muntuk sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara de-jure/de-facto, dan akuntabel.
3. Pentingnya pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan ekonomi desa, menanggulangi kemiskinan, pemberdayaan, dan mempercepat pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, L. (2023). *Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang terbuka Hijau*. 8(1). <https://doi.org/10.14710/jiip>.
- Astuti, S, R. Hardi, W, Abd, Rachim. 2020. *Collaborative Governance: Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). Promblema Relasi kuasa Antara Lembaga adat Dengan pemerintah desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98–115. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217>
- Eko, Sutoro. (2020). Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada Adminitrasi. *Jurnal Goernabilitas*, Vol 1.
- Eko, Sutoro. 2019. *Memuliakan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Fitrianti, A. A., Romadhan, A. A., & Salahudin. (2022). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 47–64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64>
- Gugat, R. M. D., Abubakar, F., & Susanti, R. (2022). Relasi Kekuasaan antar Pemerintah, Masyarakat & LSM pada Revitalisasi Teluk Jakarta. *Ijd-Demos*, 4(1), 452–465. <https://doi.org/10.37950/ijid.v4i1.219>
- Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). Kegagalan bisnis Pemerintah Desa : Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 66. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p66-72>
- Pratama, C. A., & Setiawan, F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembagunan Infrastruktur Di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099–1104.
- Puspitasari, C., Sumarjono, Perdana, P., & Mardhika, J. G. (2022). Pola Relasi Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.149>
- Retei Alfri Sandi, J. (2022). Membangun Relasi Hubungan Pemerintah Swasta Masyarakat Civil Dalam Paradigma Governance Untuk Kalteng Lebih Berkah Dan Bermartabat. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 11(1), 37–45. <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i1.4201>
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): suatu rewiew literature sistematis.

Journal Publicuho, 5(4), 995–1010.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syarifudin, Aip, S and Muaz. A. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa.. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 5: Hal 6 No 14.

Sunu, R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspekit Publik*, 161.

Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi poitik perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 213–234.
<https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>.

Widoyoko, Putro, Eko, S. 2014. *Teknik penyusunan Intrumen Penelitian*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.

Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa*. PT Elex media Komputindo. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lampiran-Lampiran

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

1. PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM SARJANA, TGA, SIKLUS TERAKREDITASI B
2. PRODI STUDI KEMERDEKAAN, PROGRAM SARJANA, SIKLUS TERAKREDITASI B
3. PRODI STUDI KEMERDEKAAN, PROGRAM SARJANA, SIKLUS TERAKREDITASI B
4. PRODI STUDI KEMERDEKAAN, PROGRAM SARJANA, SIKLUS TERAKREDITASI B

Alamat: Jl. Teneho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 560775, Fax. (0274) 515989, website www.apmd.ac.id, e-mail info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor :299/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Ignasius Suharto
Nomor Mahasiswa : 17520211
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.

a. Tempat : Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Sasaran : Governance Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Waktu : 27 Juni 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Juni 2023
Ketua

Dr. Sirego Eko Yunanto
Telp. 170 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

PROGAM PEMBIJARAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGAM STUDI KEMERDEKAAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGAM STUDI KEMERDEKAAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
PROGAM STUDI KEMERDEKAAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 512/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 27 Juni 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Ignasius Suharto
No Mhs : 17520211
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Governance Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tempat : Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Juni 2023

Dr. Sutoto Eko Yunanto
NIP. 170 230 190



Foto bersama Lurah Muntuk.



Foto bersama Carik Muntuk.



Foto bersama Kaur Pembangunan.



Foto bersama Kasi Kersra



Foto bersama Ketua Bamuskal



Foto bersama Ketua PKK



Foto bersama Ketua Karang Taruna.



Foto bersama Dukuh



Foto bersama Keuta RT 03



Foto bersama masyarakat RW 02



Foto bersama masyarakat



Foto bersama pelaku usaha



Foto bersama Pelaku Usaha



Foto kerajinan dari buluh bambu



Foto Sekret Kelompok Tani Nguni Lestari.



Foto Tandon air bersih



Foto Kelomok Tani Ngudi Rahayu



Foto Akses menuju pertanian



Foto Irigasi Pertanian Masyarakat.



Foto TTK Kalurahan Muntuk



Foto bersama Masyarakat



Foto Swalayan dan Lembaga Kalurahan



Foto bersama Lurah Muntuk



Foto Kalurahan Muntuk